

PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN

Nahar Effendi¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai
Jl. Gunung Merapi No. 1 Bumi Ayu Dumai kode Pos 28819
E-mail: naharef@yahoo.co.id

KEYWORDS

*The Principles of Empowerment
Fishing Communities
Fish Processing Business
Coaching*

ABSTRACT

Principles of Community Empowerment Fishermen. The research objective was to determine the application of the principles of community empowerment fishermen by the Department of Animal Husbandry, Fisheries and Marine Dumai. The study population was all employees of the Department of Animal Husbandry, Fisheries and Marine Dumai least 21 people and all the population sampled. Samples were 60 fishermen were taken randomly from the 200 population. Data were collected by questionnaires, interviews and observation. Data analysis using descriptive statistics. The results showed that the application of the principles of community development of new fishermen reached the unfavorable category. This was mainly due to weaknesses in the application of the principles of community empowerment fishermen by the Department of Animal Husbandry, Fisheries and Marine Dumai.

KATA KUNCI

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan
Masyarakat Nelayan
Usaha Pengolahan Ikan
Pembinaan

ABSTRAK

Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai sebanyak 21 orang dan semua populasi dijadikan sampel. Sampel nelayan adalah 60 orang diambil secara acak sederhana dari 200 populasi. Data dikumpulkan dengan kuesioner, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan baru mencapai pada kategori kurang baik. Hal ini terutama disebabkan kelemahan-kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai.

1. Pendahuluan

Pemerintah telah berupaya dengan berbagai kegiatan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran atau dapat digunakan semestinya dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan.

Dari masa ke masa Sejak orde baru sampai orde reformasi program pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir belum tergarap secara proporsional. Pemanfaatan sumber daya alam kelautan masih dilakukan secara parsial dan kurang didukung oleh teknologi yang tepat guna sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal. Kenyataan tersebut berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang tergolong rendah bahkan sebagian hidup dalam garis kemiskinan. Sebagai suatu proses, maka pemberdayaan merupakan langkah awal bagi masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dimana masyarakat bisa memiliki kekuatan, kemampuan serta menguasai sesuatu yang mampu berdayakan kehidupan mereka, baik secara pribadi, keluarga maupun dalam masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan

pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral, yakni dalam dimensi kemasyarakatan, dimensi waktu jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan kemampuan diri mereka.

Nelayan merupakan sebuah sebutan diberikan kepada kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dengan aktivitas mengeksploitasi, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan perairan yang bersifat milik semua orang. Sebagai poros tumpu kehidupan sangat ditentukan oleh musim, rentan terhadap ekosistem dan gejolak sosial ekonomi. Secara normatif seharusnya nelayan lebih sejahtera karena mengelola potensi sumber daya alam dengan jumlah besar. Namun pada kenyataannya merupakan masyarakat nelayan tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Ketertinggalan masyarakat nelayan sebagai bagian dari komunitas pesisir terlihat jelas dari kondisi rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sebagai bekal untuk mengelola sumber mata pencaharian guna menghidupi diri pribadi maupun keluarga. Pada kondisi

lain diperlihatkan oleh sumber pendapatan sangat tergantung pada kemurahan alam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunitas nelayan hanya memiliki aset waktu dan tenaga sebagai modal yang sangat terbatas untuk mengakses segala kemajuan.

Adapun persoalan nelayan yang ada pada saat ini yaitu: pendapatan yang bersifat harian dan sulit diperkirakan, tingkat pendidikan rendah, produksi bukan sebagai bahan makanan pokok dan cepat rusak, usaha membutuhkan investasi dalam jumlah besar, dan kerentanan sumber pendapatan terhadap gejolak ekonomi, sosial dan fisik. Mencermati lebih dalam akan karakter umum persoalan tersebut, diperoleh sebuah kondisi bahwa nelayan hidup dalam perangkap kemiskinan sebagai konsekuensi dari ketimpangan pemilikan aset produksi dan keterbatasan penguasaan terhadap faktor yang sangat diperlukan untuk menjadikan hidup lebih bermartabat. Pada akhirnya keadaan ini menjadikan komunitas ini sebagai kelompok masyarakat marginal dengan posisi tawar menawar sangat lemah baik sebagai subjek maupun objek dari sebuah keputusan.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Dumai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan, perikanan dan kelautan. Dalam upaya pembinaan masyarakat nelayan pesisir yang ada di Kota Dumai, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam mengupayakan peningkatan taraf hidup nelayan dengan memberikan bantuan.

Untuk melihat perkembangan jumlah nelayan serta armada penangkapan ikan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Nelayan dan Armada Penangkapan Ikan Pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Nelayan	200	Kepala Keluarga (KK)
2.	Armada penangkapan ikan	200	Unit
3.	Alat tangkap		
	- Gill net	1.355	Unit
	- Rawai	40	Unit
	- Sondong	5	Unit
	- Gombang/Pengerih	192	Unit

Sumber Data: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Tahun 2016

Tabel 1 menunjukkan perkembangan nelayan serta armada penangkapan ikan yang ada di wilayah Kota Dumai. Dari jumlah tersebut di atas, maka perlu pemberdayaan masyarakat nelayan yang lebih baik sesuai dengan program kerja Pemerintah Kota Dumai yang diwakili oleh pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai.

Pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dalam memberdayakan masyarakat nelayan dilakukan

dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Adapun tujuan dibentuknya KUB tersebut agar seluruh masyarakat nelayan memiliki kelompok tersendiri sesuai dengan daerah masing-masing. Adapun prosedur pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) kelompok minimal terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota
- 2) Mata pencaharian sehari-hari sebagai nelayan
- 3) Pendataan dan pengecekan kelapangan oleh petugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dan Lurah setempat
- 4) Penerbitan SIUP / TDPN (Tanda Daftar Pencatatan Nelayan)
- 5) Penerbitan kartu nelayan
- 6) Penerbitan surat pendaftaran kelompok nelayan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai.

Dengan membentuk KUB tersebut, pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai memberikan pembinaan kepada masyarakat nelayan berupa bantuan kepada masing-masing KUB mendapatkan bantuan uang tunai Rp. 100.000.000,- per KUB dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Masing-masing anggota KUB mendapatkan uang Rp. 10.000.000,- per orang. Adapun dana tersebut dipergunakan untuk membeli keperluan seperti keperluan alat tangkap dan armada penangkapan anggota masing-masing KUB. Adapun proses pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dengan cara sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi kepada tiap kelompok nelayan agar dapat memanfaatkan program pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan nelayan.
- b) Mendampingi nelayan dalam pembelian alat tangkap agar tidak terjadi penyalahgunaan alat tangkap.
- c) Memberikan sosialisasi pembinaan
- d) Memberikan pelatihan mengenai penggunaan alat tangkap yang baik.

Setelah membentuk KUB maka hasil tangkapan ikan di olah KUB bukan hanya berbentuk ikan tapi dalam bentuk makanan yang sudah diolah. Untuk melihat usaha beserta jenis produksinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Nama Usaha Pengolahan Perikanan Pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai

No	Nama Usaha	Jenis Produksi	Hasil Perbulan
1.	Mawar	Kerupuk ikan dan udang	40 kg
2.	Nilam Sari	Bakso ikan dan Stik udang	100 kg
3.	Teratai Presto	Bandeng presto	1.500 kg
4.	Duyung Mas	Ikan kering	500 kg

5.	Bunga Tanjung	Ikan kering	600 kg
6.	Bunga Raya	Kerupuk ikan	10 kg

Sumber Data: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat hasil olahan ikan oleh kelompok usaha bersama (KUB) yang terdapat di Kota Dumai. Dengan melihat hasil olahan tersebut, maka secara tidak langsung menambah pendapatan masyarakat khususnya dari kalangan masyarakat nelayan. Persoalan kondisi sosial ekonomi nelayan di wilayah Kota Dumai tidak jauh berbeda dengan persoalan yang dihadapi oleh nelayan pesisir lainnya di nusantara. Hal mana terpaut pada persoalan kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan, dan kepemilikan terhadap berbagai faktor antara lain: pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan permukiman, tanggungan keluarga, pendapatan, kemajuan teknologi, informasi serta sumber daya manusia nelayan itu sendiri.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan ditemukan bahwa:

1. Masih kurangnya pembinaan yang dilakukan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dalam memberdayakan masyarakat nelayan.
2. Masih kurangnya sosialisasi tentang bagaimana meningkatkan taraf hidup dengan bekerja sebagai nelayan yang diberikan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai.

Dengan melihat gejala masalah yang ditemukan di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu: **"Bagaimana prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai"**.

Pengertian tentang pemberdayaan diungkapkan oleh Mubyarto dalam Irianto (2007), pemberdayaan sebagai upaya memperbesar kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam melepaskan diri dari kesulitan hidup. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memungkinkan dan memandirikan masyarakat. Selanjutnya menurut Aziz, dkk (2005), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004), adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Soedijanto dalam Mardikanto dan Soebiato (2013), telah muncul pemikiran tentang prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat:

1. Kesukarelaan
2. Otonom
3. Keswadayaan
4. Partisipatif
5. Egaliter
6. Demokrasi
7. Keterbukaan
8. Kebersamaan
9. Akuntabilitas
10. Desentralisasi.

Pada hakikatnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan merupakan hal baru. Usaha pengembangan masyarakat dimasa lalu berkaitan dengan konteks memperjuangkan kemerdekaan sedangkan pada masa sekarang kegiatan pemberdayaan masyarakat berorientasi pada partisipasi pembangunan dalam konteks transformasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yakni Kepala Dinas, Sekretariat dan pegawai bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai yang berjumlah 21 orang dan masyarakat kelompok nelayan terdiri dari 20 kelompok sebanyak 200 orang dengan total keseluruhan populasi sebanyak 221 orang. Teknik pengambilan sampel dalam untuk pegawai, menggunakan metode sensus, adalah

pegawai yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisir serta pegawai sekretariat termasuk Kepala Dinas.

Sedangkan untuk masyarakat kelompok nelayan menggunakan metode *simple random sampling* yakni pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata populasi itu yakni sekitar 30% dari 200 orang nelayan dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, wawancara, observasi dan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun atas 3 alternatif jawaban mulai dari baik dengan skor 3, kurang baik dengan skor 2, dan tidak baik dengan skor 1. Dari hasil jawaban responden diperoleh nilai total:

Nilai total skor tertinggi : $3 \times 3 \times 81 = 729$

Nilai total skor terendah : $1 \times 3 \times 81 = 243$

Penentuan skala interval indikatornya adalah selisih antara nilai total skor tertinggi dengan nilai total skor terendah dibagi jumlah tiga kategori.

Maka interval skor (skala interval) adalah $\frac{729 - 243}{3} = 162$

dengan skala intervalnya (interval skor) 163, maka kategori indikator variabel adalah:

Baik apabila total skor antara $576 - 729$

Kurang baik total skor antara $405 - 575$

Tidak baik total skor antara $243 - 404$

Interval skor untuk variabel penelitian adalah selisih nilai total skor tertinggi dengan nilai total skor terendah yaitu $\frac{7290 - 2430}{3} = 1620$

Penentuan kategori penilaian seluruh indikator, dengan skala intervalnya 1620, maka total masing-masing kategori adalah:

Baik apabila total skor antara : $5760 - 7290$

Kurang Baik apabila total skor antara : $4050 - 5759$

Tidak Baik apabila total skor antara : $2430 - 4049$

Teknik analisa data yang digunakan yaitu *statistik deskriptif* merupakan sebuah teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dalam bentuk tabel frekuensi dengan angka persentase kemudian ditafsirkan dalam pengertian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

3.1.1 Kesukarelaan

Merupakan suatu keterlibatan masyarakat nelayan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai yang dilandasi atas dasar kesadaran sendiri atau sukarela dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupannya.

Adapun sub indikator kesukarelaan dapat dilihat dari :

- Terdapatnya keterlibatan masyarakat nelayan dalam kegiatan dengan kesadaran sendiri.
- Terdapatnya keinginan masyarakat untuk aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan.
- Terdapatnya motivasi masyarakat meningkatkan taraf kehidupannya.

Ketiga sub indikator tersebut akan mempengaruhi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya indikator kesukarelaan dapat dilihat pada tabel berikut :

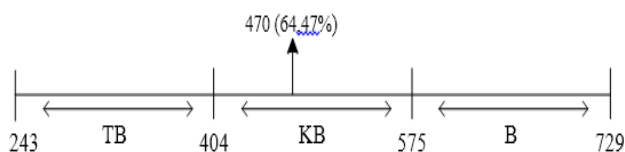
Tabel 3. Tanggapan Responden tentang Kesukarelaan

No	Sub Indikator	Pegawai	Masyarakat	Skor
1.	Keterlibatan masyarakat nelayan dalam kegiatan dengan kesadaran sendiri	46	111	157
2.	Keinginan masyarakat untuk aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan	46	105	151
3.	Motivasi masyarakat meningkatkan taraf kehidupannya	54	108	162
Total Skor		146	324	470

Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 3 dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dilihat dari indikator kesukarelaan dapat dikategorikan kurang baik, dilihat dari tiga sub indikator yaitu terdapatnya keterlibatan masyarakat nelayan dalam kegiatan pemberdayaan atas kesadaran sendiri diperoleh skor jawaban sebanyak 157, terdapatnya keinginan masyarakat untuk selalu aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 151, dan terdapatnya motivasi masyarakat meningkatkan taraf kehidupannya diperoleh skor jawaban sebanyak 162, yang secara keseluruhan total skor jawaban sebanyak 470 berada pada kategori kurang baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan kontinum di atas, dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang kesukarelaan berada pada kategori kurang baik, dengan total skor jawaban sebanyak 470, diantara rentang skor 404-575, dan nilai persentase yang terdapat pada garis kontinum 64,47%.

3.1.2 Otonom

Merupakan suatu kemampuan masyarakat nelayan untuk mandiri atau ketergantungan dari lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupannya pada masa yang akan datang.

Adapun sub indikator otonom dapat dilihat dari :

- Terdapatnya kemampuan masyarakat nelayan untuk selalu hidup mandiri
- Terdapatnya keinginan masyarakat nelayan untuk tidak bergantung kepada lembaga lainnya
- Terdapatnya kemampuan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan secara ekonomis dan mandiri

Dimana ketiga sub indikator tersebut akan mempengaruhi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator otonom dapat dilihat pada tabel berikut ini :

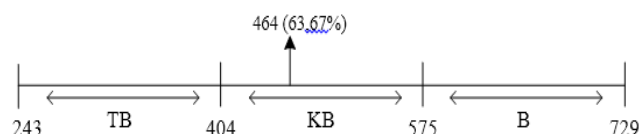
Tabel 4. Tanggapan Responden tentang Otonom

No	Sub Indikator	Pegawai	Masyarakat	Skor
1.	Kemampuan masyarakat nelayan untuk selalu hidup mandiri	45	109	154
2.	Keinginan masyarakat nelayan untuk tidak bergantung kepada lembaga lainnya	44	108	152
3.	Kemampuan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan secara ekonomis dan mandiri	46	112	158
Total Skor		135	329	464

Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 4 dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dilihat dari

indikator otonom dapat dikategorikan kurang baik, dilihat dari tiga sub indikator yaitu terdapatnya kemampuan masyarakat nelayan untuk selalu hidup mandiri diperoleh skor jawaban sebanyak 154, terdapatnya keinginan masyarakat nelayan untuk tidak bergantung kepada lembaga lainnya diperoleh skor jawaban sebanyak 152, dan terdapatnya kemampuan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan secara ekonomis dan mandiri diperoleh skor jawaban sebanyak 158, yang secara keseluruhan total skor jawaban sebanyak 464 berada pada kategori kurang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kontinum berikut:



Berdasarkan kontinum di atas, dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang otonom berada pada kategori kurang baik, dengan total skor jawaban sebanyak 464, diantara rentang skor 404-575, dan nilai persentase yang terdapat pada garis kontinum 63,65%.

3.1.3 Keswadayaan

Merupakan suatu kemampuan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dengan masyarakat nelayan dalam merumuskan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan dengan penuh tanggungjawab tanpa mengharapkan dukungan dari pihak lain.

Adapun sub indikator keswadayaan dapat dilihat dari :

- Terdapatnya kemampuan pegawai dan masyarakat dalam merumuskan kegiatan pemberdayaan
- Terdapatnya tanggungjawab dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
- Terdapatnya pola kerja yang terarah dengan musyawarah bersama

Dalam pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat nelayan dilaksanakan dengan musyawarah bersama.

Dimana ketiga sub indikator tersebut akan mempengaruhi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya indikator keswadayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Tanggapan Responden tentang Keswadayaan

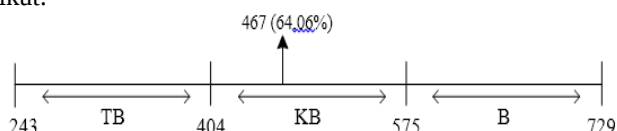
No	Sub Indikator	Pegawai	Masyarakat	Skor
1.	Kemampuan pegawai dan masyarakat dalam merumuskan kegiatan pemberdayaan	44	106	150

2.	Tanggungjawab dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	57	104	161
3.	Pola kerja yang terarah dengan musyawarah bersama	57	99	156
Total Skor		158	309	467

Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 5 dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dilihat dari indikator keswadayaan dapat dikategorikan kurang baik, dilihat dari tiga sub indikator yaitu terdapatnya kemampuan pegawai dan masyarakat dalam merumuskan kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 150, terdapatnya tanggungjawab dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 161, dan terdapatnya pola kerja yang terarah dengan musyawarah bersama diperoleh skor jawaban sebanyak 156, yang secara keseluruhan total skor jawaban sebanyak 467 berada pada kategori kurang baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan kontinum di atas, dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang keswadayaan berada pada kategori kurang baik, total skor jawaban sebanyak 467, diantara rentang skor 404-575, dan nilai persentase yang terdapat pada garis kontinum 64,06%.

3.1.4 Partisipatif

Merupakan suatu keterlibatan semua *stakeholder* seperti pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dan masyarakat nelayan dalam pelaksanaan pemberdayaan mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, evaluasi sampai dengan pemanfaatan hasil kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun sub indikator partisipatif dapat dilihat dari :

- Terdapatnya keterlibatan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dan masyarakat
- Terdapatnya pengambilan keputusan dari kedua belah pihak
- Terdapatnya kerjasama antar pegawai dan masyarakat nelayan

Ketiga sub indikator tersebut akan mempengaruhi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya indikator partisipatif dapat dilihat pada tabel berikut :

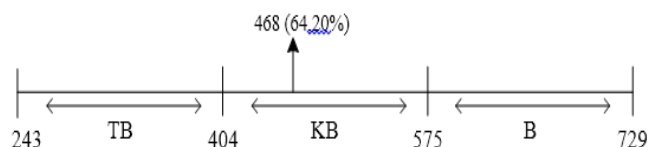
Tabel 6. Tanggapan Responden tentang Partisipatif

No	Sub Indikator	Pegawai	Masyarakat	Skor
1.	Keterlibatan pihak Dinas dan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	59	97	156
2.	Pengambilan keputusan dari kedua belah pihak dalam kegiatan pemberdayaan	54	103	157
3.	Kerjasama antar pegawai dan masyarakat nelayan dalam kegiatan pemberdayaan	56	99	155
Total Skor		169	299	468

Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 6 dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dilihat dari indikator partisipatif dapat dikategorikan kurang baik, dilihat dari tiga sub indikator yaitu terdapatnya keterlibatan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 156, terdapatnya pengambilan keputusan dari kedua belah pihak dalam kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 157, dan terdapatnya kerjasama antar pegawai dan masyarakat nelayan dalam kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 155, yang secara keseluruhan total skor jawaban sebanyak 468 berada pada kategori kurang baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan kontinum di atas, dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang partisipatif berada pada kategori kurang baik, dengan total skor jawaban sebanyak

468, diantara rentang skor 404-575, dan nilai persentase yang terdapat pada garis kontinum 64,20%.

3.1.5 Egaliter

Merupakan suatu tindakan yang menempatkan semua pihak yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan pada kedudukan yang setara, sama, sejajar dan tidak ada yang ditinggikan ataupun yang merasa direndahkan.

Adapun sub indikator egaliter dapat dilihat dari :

- Terdapatnya kedudukan yang sama semua pihak dalam kegiatan pemberdayaan
- Terdapatnya persamaan hak dan kewajiban dari semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemberdayaan
- Terdapatnya rasa saling menghormati antar semua pihak yang berkepentingan

Dimana ketiga sub indikator tersebut akan mempengaruhi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator egaliter dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Tanggapan Responden tentang Egaliter

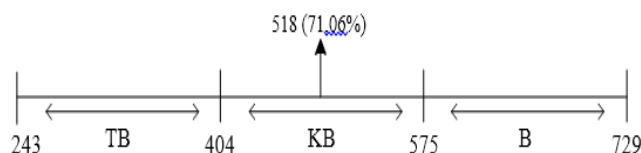
No	Sub Indikator	Pegawai	Masyarakat	Skor
1.	Kedudukan yang sama semua pihak dalam kegiatan pemberdayaan	55	115	170
2.	Persamaan hak dan kewajiban dari semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemberdayaan	53	113	166
3.	Rasa saling menghormati antar semua pihak yang berkepentingan	61	121	182
	Total Skor	169	349	518

Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 7 dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dilihat dari indikator egaliter dapat dikategorikan kurang baik, dilihat dari tiga sub indikator yaitu terdapatnya kedudukan yang sama semua pihak dalam kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 170, terdapatnya persamaan hak dan kewajiban dari semua pihak yang berkepentingan dalam

pelaksanaan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 166, dan terdapatnya rasa saling menghormati antar semua pihak yang berkepentingan diperoleh skor jawaban sebanyak 182, yang secara keseluruhan total skor jawaban sebanyak 518 berada pada kategori baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan kontinum di atas, dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang egaliter berada pada kategori kurang baik, dengan total skor jawaban sebanyak 518, diantara rentang skor 404-575, dan nilai persentase yang terdapat pada garis kontinum 71,06%.

3.1.6 Demokrasi

Merupakan suatu hak kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dalam mengeluarkan pendapat dan saling menghargai pendapat atau perbedaan di antara sesama pihak yang ada.

Adapun sub indikator demokrasi dapat dilihat dari :

- Adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam kegiatan pemberdayaan
- Adanya kesempatan dalam menyampaikan saran atau masukan untuk kemajuan kegiatan pemberdayaan
- Adanya saling menghargai pendapat atau perbedaan satu sama lainnya

Dimana ketiga sub indikator tersebut akan mempengaruhi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator demokrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Tanggapan Responden tentang Demokrasi

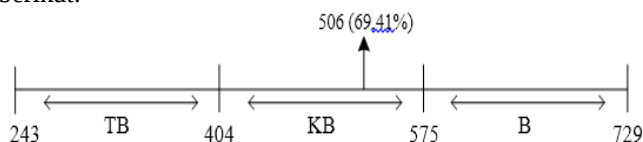
No	Sub Indikator	Pegawai	Masyarakat	Skor
1.	Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam kegiatan pemberdayaan	57	110	167
2.	Kesempatan dalam menyampaikan saran atau masukan untuk kemajuan kegiatan pemberdayaan	58	112	170

3.	Saling menghargai pendapat atau perbedaan satu sama lainnya	56	113	169
Total Skor		171	335	506

Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 8 dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dilihat dari indikator demokrasi dapat dikategorikan baik, dilihat dari tiga sub indikator yaitu adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat mengenai kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 167, adanya kesempatan dalam menyampaikan saran atau masukan untuk kemajuan kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 170, dan adanya saling menghargai pendapat atau perbedaan satu sama lainnya diperoleh skor jawaban sebanyak 169, yang secara keseluruhan total skor jawaban sebanyak 506 berada pada kategori kurang baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan kontinum di atas, dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang demokrasi berada pada kategori kurang baik, dengan total skor jawaban sebanyak 506, diantara rentang skor 404-575, dan nilai persentase pada garis kontinum 69,41%.

3.1.7 Keterbukaan

Merupakan suatu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dari pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai secara terbuka yang dilandasi dengan kejujuran, saling percaya dan saling mempedulikan nasib atau kehidupan masyarakat nelayan dengan memberikan sosialisasi atau pengarahan.

Adapun sub indikator keterbukaan dapat dilihat dari :

- Adanya keterbukaan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dalam kegiatan pemberdayaan
- Adanya rasa saling percaya antar pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dengan masyarakat nelayan
- Adanya sosialisasi dalam penggunaan alat tangkap dan jalur batas yang dapat dipahami oleh masyarakat nelayan

Ketiga sub indikator tersebut akan mempengaruhi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Untuk jelasnya mengenai indikator keterbukaan dapat dilihat pada tabel berikut:

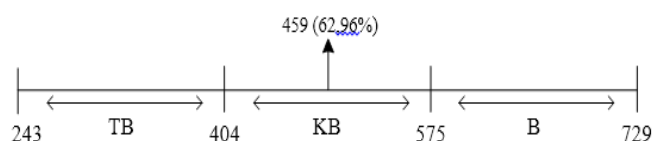
Tabel 9. Tanggapan Responden tentang Keterbukaan

No	Sub Indikator	Pegawai	Masyarakat	Skor
1.	Keterbukaan pihak Dinas dalam kegiatan pemberdayaan	55	100	155
2.	Rasa saling percaya antar pihak masyarakat nelayan	54	103	157
3.	Sosialisasi dalam penggunaan alat tangkap dan jalur batas yang dapat dipahami oleh masyarakat nelayan	53	94	147
Total Skor		162	297	459

Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 9 dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dilihat dari indikator keterbukaan dapat dikategorikan kurang baik, dilihat dari tiga sub indikator yaitu adanya keterbukaan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dalam kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 155, adanya rasa saling percaya antar pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dengan masyarakat nelayan diperoleh skor jawaban sebanyak 157, dan adanya sosialisasi dalam penggunaan alat tangkap dan jalur batas yang dapat dipahami oleh masyarakat nelayan diperoleh skor jawaban sebanyak 147, yang secara keseluruhan total skor jawaban sebanyak 459 berada pada kategori kurang baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan kontinum di atas, dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang keterbukaan berada pada kategori kurang baik, dengan total skor jawaban sebanyak 459, diantara rentang skor 404-575, dan nilai persentase pada garis kontinum 62,96%.

3.1.8 Kebersamaan

Merupakan suatu bentuk sikap Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai terhadap masyarakat nelayan dengan saling berbagi rasa, memberikan bantuan dan mengembangkan komunikasi yang baik dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.

Adapun sub indikator kebersamaan dapat dilihat dari :

- Kegiatan gotong royong yang dilaksanakan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai bersama masyarakat nelayan
- Bantuan dana dan alat-alat penangkapan oleh Dinas untuk masyarakat nelayan
- Komunikasi antar pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dengan masyarakat nelayan

Ketiga sub indikator tersebut akan mempengaruhi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kebersamaan dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Tanggapan Responden tentang Kebersamaan

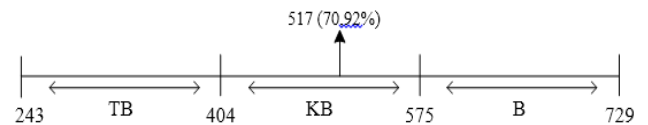
No	Sub Indikator	Pegawai	Masyarakat	Skor
1.	Kegiatan gotong royong yang dilaksanakan pihak Dinas bersama masyarakat nelayan	48	122	170
2.	Bantuan dana dan alat-alat penangkapan oleh Dinas untuk masyarakat nelayan	60	116	176
3.	Komunikasi antar pihak Dinas dengan masyarakat nelayan	62	109	171
Total Skor		170	347	517

Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 10 dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dilihat dari indikator kebersamaan dapat dikategorikan baik, dilihat dari tiga sub indikator yaitu terdapatnya kegiatan gotong royong yang dilaksanakan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai bersama masyarakat nelayan diperoleh skor jawaban sebanyak 170, terdapatnya bantuan dana dan alat-alat penangkapan untuk masyarakat nelayan diperoleh skor jawaban sebanyak 176, dan terdapatnya komunikasi antar pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dengan masyarakat nelayan diperoleh skor jawaban

sebanyak 171, yang secara keseluruhan total skor jawaban sebanyak 517 berada pada kategori baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan kontinum dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang kebersamaan berada pada kategori baik, dengan total skor jawaban sebanyak 517, diantara rentang skor 404-575, dan nilai persentase yang terdapat pada garis kontinum 70,92%.

3.1.9 Akuntabilitas

Merupakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan terbuka untuk mendapatkan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Adapun sub indikator akuntabilitas dapat dilihat dari :

- Tanggungjawab pegawai dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
- Pengawasan dari Dinas dalam kegiatan pemberdayaan
- Kerjasama pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dengan instansi terkait lainnya

Dimana ketiga sub indikator tersebut akan mempengaruhi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Untuk jelasnya mengenai indikator akuntabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

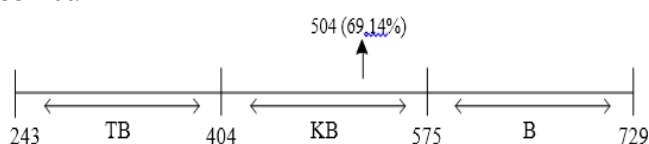
Tabel 11. Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas

No	Sub Indikator	Pegawai	Masyarakat	Skor
1.	Tanggungjawab pegawai dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	56	111	167
2.	Pengawasan dari Dinas dalam kegiatan pemberdayaan	58	108	166
3.	Kerjasama pihak Dinas dengan instansi terkait lainnya	59	112	171
Total Skor		173	331	504

Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 11 dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dilihat dari indikator akuntabilitas dapat dikategorikan kurang baik, dilihat dari tiga sub indikator yaitu terdapatnya tanggungjawab pegawai dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 167, terdapatnya pengawasan dari pihak yang berwenang dalam kegiatan pemberdayaan diperoleh skor jawaban sebanyak 166, dan terdapatnya kerjasama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dengan instansi terkait lainnya diperoleh skor jawaban sebanyak 171, dengan total skor jawaban sebanyak 504 berada pada kategori kurang baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan kontinum di atas, dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang akuntabilitas berada pada kategori kurang baik, dengan total skor jawaban sebanyak 504, diantara rentang skor 404-575, dan nilai persentase pada garis kontinum 69,14%.

3.1.10 Desentralisasi

Merupakan suatu kewenangan yang diberikan pemerintah Kota Dumai kepada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya nelayan agar menjadi makmur, maju dan kesinambungan pembangunan.

Adapun sub indikator desentralisasi dapat dilihat dari :

- Pembinaan yang berkelanjutan dari pihak Dinas dalam memberdayakan masyarakat nelayan
- Merubah pola pikir masyarakat nelayan untuk selalu lebih maju dan berkembang
- Kegiatan pemberdayaan yang memberikan dampak positif terhadap kelanjutan pembangunan

Ketiga sub indikator tersebut akan mempengaruhi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator desentralisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Tanggapan Responden tentang Desentralisasi

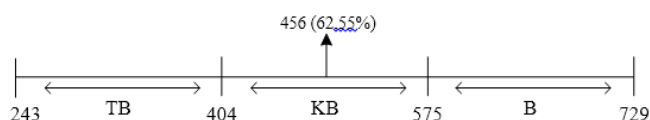
No	Sub Indikator	Pegawai	Masyarakat	Skor
----	---------------	---------	------------	------

1.	Pembinaan yang berkelanjutan dari pihak Dinas dalam memberdayakan masyarakat nelayan	54	95	149
2.	Merubah pola pikir masyarakat nelayan untuk selalu lebih maju dan berkembang	52	99	151
3.	Kegiatan pemberdayaan yang memberikan dampak positif terhadap kelanjutan pembangunan	54	102	156
Total Skor		160	296	456

Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel 12 dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dilihat dari indikator desentralisasi dapat dikategorikan kurang baik, dilihat dari tiga sub indikator yaitu adanya pembinaan yang berkelanjutan dari pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dalam memberdayakan masyarakat nelayan diperoleh skor jawaban sebanyak 149, adanya peningkatan pola pikir masyarakat nelayan untuk selalu lebih maju dan berkembang diperoleh skor jawaban sebanyak 151, dan adanya kegiatan pemberdayaan yang memberikan dampak positif terhadap kelanjutan pembangunan diperoleh skor jawaban sebanyak 156, yang secara keseluruhan total skor jawaban sebanyak 456 berada pada kategori kurang baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut:



Berdasarkan kontinum dapat dikatakan bahwa tanggapan responden tentang desentralisasi berada pada kategori kurang baik, dengan total skor jawaban sebanyak 456, diantara rentang skor 404-575, dan nilai persentase yang terdapat pada garis kontinum 62,55%.

Selanjutnya dari 10 (sepuluh) indikator, yang secara keseluruhan dapat dikategorikan kurang baik, dapat dilihat dari tabel rekapitulasi berikut ini:

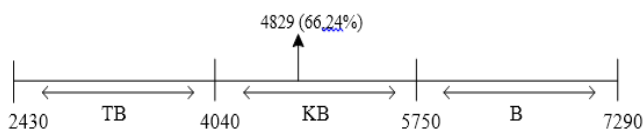
Tabel 13. Rekapitulasi Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai

No	Indikator	Pegawai	Masyarakat	Skor
1.	Kesukarelaan	146	324	470
2.	Otonom	135	329	464
3.	Keswadayaan	158	309	467
4.	Partisipatif	169	299	468
5.	Egaliter	169	349	518
6.	Demokrasi	171	336	506
7.	Keterbukaan	162	297	459
8.	Kebersamaan	170	347	517
9.	Akuntabilitas	173	331	504
10.	Desentralisasi	160	296	456
Total Skor		1.613	3.216	4.829

Sumber Data: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Tahun 2016

Berdasarkan tabel rekapitulasi dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, dapat dikategorikan kurang baik. Kenyataan ini terbukti dalam penelitian yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) indikator yaitu dengan total skor jawaban sebanyak 4.829.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kontinum sebagai berikut:



Dari kontinum di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden secara keseluruhan dari 10 (sepuluh) indikator berada pada kategori kurang baik, dengan total skor jawaban sebanyak 4.829, diantara rentang skor 4040-5750, dengan nilai persentase yang terdapat pada kontinum sebesar 66,24%.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, penulis menemukan faktor pendukung serta faktor penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, memiliki beberapa faktor pendukung antara lain :

- Adanya egaliter dalam prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan, dilihat dari terdapatnya rasa saling menghormati antar semua pihak yang berkepentingan
 - Adanya kebersamaan dalam prinsip pemberdayaan masyarakat, nelayan dilihat dari terdapatnya bantuan dana dan alat-alat penangkapan untuk masyarakat nelayan
- 2) Faktor Penghambat

Selanjutnya faktor yang menjadi penghambat terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, antara lain:

- Masih kurangnya keterbukaan dalam prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan, dilihat dari kurangnya sosialisasi dalam penggunaan alat tangkap dan jalur batas yang dapat dipahami oleh masyarakat nelayan
- Masih kurangnya desentralisasi dalam prinsip pemberdayaan masyarakat nelayan, dilihat dari kurangnya pembinaan yang berkelanjutan dari pihak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dalam memberdayakan masyarakat nelayan.

4. Kesimpulan

Pembinaan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai melalui penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat baru tercapai pada kategori kurang baik. Dari 10 prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, ternyata 2 (dua) prinsip yang terlaksana pada kategori baik yaitu prinsip egaliter dan kebersamaan. Sedangkan prinsip-prinsip yang paling lemah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan adalah prinsip kurangnya keterbukaan dan desentralisasi atau keotonomian nelayan dalam usaha pengolahan penangkapan ikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. Ali dkk.(2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta, Pustaka Pesantren.
- Irianto, S. (2007). *Nelayan di Mata Kita Sebuah Perpektif Berpikir Sistem*. Dumai.
- Totok, M., & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyan, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.